



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 83 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2011 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Batam, maka perlu merevisi Indikator Kinerja pada sasaran strategis RPJMD Kota Batam sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Revisi indikator dapat dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

5. Kinerja Organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 2

Beberapa indikator kinerja pada sasaran strategis Bab VI RPJMD Kota Batam dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016 diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 208

Misi 1 : Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan pengelola kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD
1	2	3
1	Tercapai kesepakatan program bersama yang saling memberikan manfaat untuk tahun 2012-2016	Kerjasama dengan Daerah Lain Jumlah promosi yang diikuti dalam dan luar negeri
2	Memfasilitasi standar perijinan pada kawasan-kawasan binaan Pengelola Kawasan.	Jumlah Perizinan yang telah diterbitkan tepat waktu
3	Memberikan informasi yang handal dan terbaru bagi investasi di Kota Batam	Jumlah Tenaga LKPM yang terlatih
4	Memberikan kepastian dukungan berinvestasi	Jumlah Perusahaan yang diawasi
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM	Jumlah Pelaku UMKM yang tangguh serta mempunyai kecakapan dan keahlian dengan mengembangkan potensi daerah dan potensi diri. Jumlah Pelaku UMKM yg menguasai strategi pemasaran produk secara global dan mampu membaca peluang pasar Jumlah hasil produksi UMKM yang mampu memenuhi target kebutuhan pasar melalui pemberian bantuan modal
6	Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu	Tingkat Kapabilitas Pasar
7	Mendorong berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah untuk pedagang	Jumlah Pendampingan dana bergulir
8	Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagai jenis usaha termasuk koperasi yang bergerak disektor pertanian	Jumlah kerjasama melalui kemitraan dan jaringan Usaha antara Koperasi dengan UMKM dan Usaha besar Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina Jumlah pertumbuhan/jumlah koperasi yang berasal dari kelompok pemuda, wanita, pedagang pasar dan nelayan/tani Persentase koperasi yang telah mengalami peningkatan klasifikasi Jumlah tokoh masyarakat yang diberi sosialisasi tentang koperasi Persentase koperasi aktif Jumlah koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri
9	Memfasilitasi dan mempermudah upaya masyarakat untuk mengakses KUR pada industri dan pedagang mikro, kecil dan menengah.	Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa Tingkat keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lembaga kemasyarakatan Jumlah Bantuan alat penerangan dan kelistrikan bagi tim TKPKD dan Masyarakat Hinterland guna meningkatkan kualitas masyarakat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD
1	2	3
10	Fasilitasi pembangunan pasar dan pusat transaksi perikanan laut internasional dengan pola swasta	Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan Jumlah RTP Perikanan budidaya dan mengolah hasil perikanan yang diberi bantuan sarana usahanya
11	Menjamin kesehatan lingkungan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan/ternak	Cakupan Pelayanan kesehatan hewan / ternak Se-Kota Batam (65%) Tersedianya sarana dan prasarana hasil produksi peternakan
12	Meningkatkan teknologi dan SDM peternakan untuk menghadapi tantangan global berbasis sumberdaya lokal	Tingkat peran serta masyarakat di bidang ketahanan pangan di Kota Batam Jumlah kenaikan produksi Pertanian
13	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	Luasan Hutan Yang direboisasi Jumlah penanaman bibit tanaman dan pemeliharaan pohon
14	Berdirinya dan optimalisasi kerja unit-unit layanan konsumen Kota Batam seperti BPSK, UPT Kemetrolagian serta Dekranasda	Persentase Perlindungan Konsumen Cakupan Pelayanan UPT Metrologi Legal Tingkat keberhasilan kerajinan daerah Tingkat pengawasan terhadap kegiatan usaha industry
15	Meningkatkan keterkaitan aktivitas antara distribusi dan logistik	Jumlah Pelaksanaan Coperasi Pasar
16	Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional.	Jumlah Peningkatan Kepariwisata Kota Batam Peningkatan keterampilan (skill) SDM Kepariwisata

Misi 2 : Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD
1	2	3
1	Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut	Keberadaan PERDA RTRW Berkurangan Jumlah Pertambangan tanpa izin, pengangkutan dan penjualan hasil tambang Pembangunan/peningkatan/ ruang terbuka publik
2	Fasilitasi pihak pengelolaan sumber energi listrik dan alternatif lain	Jumlah Penyalur BBM tertentu dan penyalur LPG tertentu yang diawasi di Kota Batam Tersedianya Bahan penyusunan peraturan di bidang ketenagalistrikan
3	Terwujudnya tatakelola pertanahan dan land banking yang optimal	Persentase lahan yang telah di inventarisasi kepemilikan surat/bersertifikat di wilayah hinterland
4	Tersedianya lahan untuk fasum dan fasos pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik	Jumlah lahan siap bangun milik Pemerintah Kota Batam Persentase Tersedianya peta land use Jumlah tenaga teknis bidang pertanahan Jumlah lokasi kampung tua yang sudah di inventarisasi
5	Terwujudnya penataan lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, indah dan nyaman	Jumlah Lampu PJU yang terbangun Jumlah Titik Lampu PJU yang terpelihara Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi Tersedia dan terpeliharanya alat berat pendukung sarana dan prasarana kebinamargaan
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland	Jumlah sarana dan prasarana Infrastruktur Jalan Jumlah sarana dan prasarana Infrastruktur Jembatan Tersedianya data perencanaan jalan Tersedianya data perencanaan jembatan/pelantar Hinterland Jumlah sarana dan prasarana Infrastruktur Jalan Hiterland Jumlah sarana dan prasarana Infrastruktur Jembatan Hiterland Panjang jalan yang dipelihara Jumlah penataan TPU Pelaksanaan PNPM (DDUB) Jumlah bangunan gedung negara yang dibangun dan dipelihara Jumlah Jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan Tingkat pemahaman stakeholder jasa konstruksi dalam penyelenggaraan bangunan gedung Jumlah Pelayanan administrasi perizinan bangunan dan jasa konstruksi Tersusunnya dokumen perencanaan Prasarana Sarana Dasar lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan Penegakan aturan tata bangunan dan keandalan pada bangunan gedung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD
1	2	3
7	Penyelenggaraan sistem drainase yang baik	Panjang drainase yang dibangun
		Cakupan Pelayanan Drainase
		Tersedianya data perencanaan drainase
8	Pengurangan Genangan Air di Pusat Kota	Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Urum di Kawasan Perkotaan yang rawan longsor
9	Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan	Bertambahnya jumlah penduduk yang terlayani air bersih di daerah hinterland
10	Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal	Tingkat Kelaikan sarana LLAJ
		Tingkat Kecukupan sarana LLAJ
		Tingkat Keamanan Kelaikan sarana Transportasi Jalan
11	Meningkatnya Teknologi Informasi yang adaptif, aplikatif dan terpadu dalam pembangunan	Jumlah menara terpadu yang tersedia
		Jumlah izin TV Kabel yang lengkap
		Persentase Jaringan Komunikasi Data yang Aman dan Handal
		Persentase Jaringan Komunikasi Data yg terintegritas
		Persentase Pengembangan Jaringan Infrastruktur yang Memadai
		Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dibangun
		Persentase Aplikasi e-government yang dibangun
12	Terwujudnya kerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik walikota menjawab)	Persentase Penyebaran Informasi Publik melalui media cetak dan elektronik
		Persentase Fasilitasi Penyebaran Informasi Publik melalui tatap muka dan siaran keliling
		Rasio Informasi di Portal Pemko Batam (Media Online)

Misi 3 : Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kemudahan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD
1	2	3
1	Meningkatkan daya tampung SD, SMP, SMA	Angka Partisipasi Kasar (APK SD) Angka Partisipasi Kasar (APK SMP) Angka Partisipasi Kasar (APK SMA/SMK) Angka Partisipasi Murni (APM SD) Angka Partisipasi Murni (APM SMP) Angka Partisipasi Murni (APM SMA/SMA) Ratio Siswa Per Kelas Tingkat Pelayanan Sekolah
2	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah	Persentase Guru Berkualifikasi Akademik S1 Persentase Kelulusan Siswa
3	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah	Angka melanjutkan Ratio Kelas Per Guru Siswa Ber- NEM Tinggi
4	Mendorong tumbuh kembangnya perpustakaan keliling dan taman baca	Persentase Tingkat minat baca siswa di Kota dan wilayah hinterland Cakupan Pelayanan Perpustakaan keliling Kota Batam
5	Meningkatnya Persediaan Obat dan Alat Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Persentase Sarana Kefarmasian yang mendapat Pengawasan
6	Menambah kapasitas dan Layanan Puskesmas	Persentase Peningkatan Kemampuan Puskesmas Perawatan yang melaksanakan PONED
7	Menambah sarana kesehatan pemerintah	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun /rehab Jumlah sarana kesehatan yang diperbaiki
8	Meningkatnya Kualitas Hidup melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Cakupan Imunisasi (bayi yg mendapatkan imunisasi dasar lengkap) Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate) TB Paru Persentase Balita dengan Gizi Buruk Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Insiden Rate (Angka Kejadian) DBD Persentase Informasi Kesehatan yang dibutuhkan Masyarakat melalui Pengembangan Media Persentase ketersediaan profil Kesehatan Persentase Cakupan desa siaga aktif
9	Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR	Jumlah PSU Perumahan Permukiman

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD
1	2	3
10	Menurunkan Kawasan Daerah Kumuh	Jumlah penataan lingkungan perumahan permukiman kumuh (DDUB)
11	Terciptanya hubungan industrial dan fasilitasi pekerja yang baik	jumlah tenaga kerja yang dilatih
		Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
		Jumlah kasus yang ditangani
		Persentase kenaikan UMK Batam
12	Tersedianya Lapangan Kerja Baru	jumlah pencari kerja yang ditempatkan
13	Berkurangnya kecelakaan kerja	Jumlah tenaga yang dilatih untuk usaha mandiri
14	Meningkatnya pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan	jumlah perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan
		Persentase Pemuda berwirausaha
		Jumlah Kegiatan Kepemudaan
15	Terciptanya pusat olahraga bertaraf nasional dan internasional	Jumlah Kegiatan Olahraga
16	Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah Gedung Olahraga/Stadion Olahraga
		Jumlah rumah layak huni Bag Masyarakat Miskin
		Jumlah anak panti asuhan yang dibantu
		Jumlah Korban bencana alam yang ditangani
		Jumlah Lansia terlantar yang dibina
		Jumlah orang terlantar dan korban kekerasan pekerja imigran
		Jumlah PMKS yang diberikan keterampilan
		Jumlah PMKS
		Jumlah Program Keluarga Harapan (PKH)
	Jumlah Penyandang Cacat yang dibantu	
17	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah perempuan di bidang usaha ekonomi produktif.
		Jumlah penyuluhan kasus tindak kekerasan, eksploitasi terhadap perempuan dan anak
		Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman tentang perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
18	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bahaya narkoba	Jumlah orang yang diberi pemahaman tentang Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS/Penyuluhan

Misi 4 : Menumbuhkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup

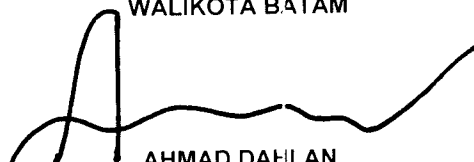
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD
1	2	3
1	Berkembangnya nilai-nilai seni budaya melayu dan daerah lainnya	Jumlah alat dan Keterampilan pelaku Seni Jumlah pembinaan pengembangan kebudayaan dan Pariwisata
2	Memberikan ruang publik bagi kegiatan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya	Penyelenggaraan festival budaya daerah operasional marching Band Kota Batam
3	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan waduk, pesisir dan laut	Jumlah dokumen lingkungan yang disetujui (AMDAL, UKL/UPL, DPPL, DPLH, DELH dan SPPL) eksisting 911 dokumen menjadi 1300 dokumen Tingkat ketaatan pelaporan RKL/RPL dari 22 % tahun 2011 menjadi minimal 70 % dari kondisi eksisting 911 dokumen Persentase tingkat ketaatan pelaksanaan RKL/RPL dan UKL-UPL dari 5 % tahun 2011 menjadi 50 % dari kondisi eksisting 911 dokumen Jumlah izin Gangguan (HO) yang diterbitkan 666 izin pada tahun 2011 menjadi 1200 izin
4	Penyelenggaraan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan limbah cair pemulihan dan industri	Persentase perusahaan yang mengurus izin pembuangan air limbah dengan target 50 perusahaan
5	Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan berbahaya dan beracun	Jumlah pengawasan industri penghasil limbah B3 dari 72 % menjadi minimal 80 % dari prediksi potensi 500 perusahaan penghasil limbah B3 pada tahun 2016. Persentase perusahaan yang mengurus izin TPS limbah B3 dengan target tahun 2013 sebesar 45 % dari 375 perusahaan Jumlah kendaraan bermotor yang lulus emisi gas buang
6	Terlindungnya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	pelaksanaan cut and fill yg memenuhi standar teknis dan administrasi minimal 40% s/d 80% dari perusahaan.
7	Meningkatnya Kepedulian pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan	persentase penyelesaian kasus lingkungan yang ditangani baik secara administrasi, perdata maupun pidana persentase perusahaan yang taat administrasi dan teknis dalam pengelolaan limbah cair persentase perusahaan yang taat administrasi dan teknis dalam pengelolaan emisi sumber tidak bergerak persentase tingkat pelayanan informasi lingkungan kepada stakeholder dan masyarakat dari 10 kriteria yang telah ditetapkan tersedianya sarana dan prasarana pengawasan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Ditindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat mengenai lingkungan hidup sesuai SPM lingkungan. Peningkatan nilai hasil evaluasi pemantauan adipura dari minimal 68 % menjadi maksimal 80 % Jumlah sekolah yang akan dibina dan ikut dalam penilaian program Adiwiyata
8	Penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan hutan tertata seluas 30%	Jumlah Pembibitan tanaman di kebun pembibitan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD
1	2	3
9	Penyelenggaraan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan	Volume sampah yang terangkut
10	Terbangun dan terkelola sistem pengolahan sampah dan reduksi sampah sesuai beban kota	Panjang Kebersihan Jalan yang ditangani
		Cakupan pelayanan drainase
		Tingkat Pengelolaan persampahan
		Jumlah lokasi Kebersihan Daerah Pasang Surut yang dilaksanakan
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kebersihan.
		Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kebersihan
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
11	Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat	Persentase Penataan dan Pengaturan Jumlah Penduduk dan Administrasi Kependudukan
		Jumlah kepengurusan E-KTP
		Jumlah Kepemilikan KTP
		Jumlah Kepemilikan Akta kelahiran
		Jumlah Razia Keperddudukan
		Persentase arsip catatan sipil yang tertata
		Jumlah permohonan pembuatan dokumen kependudukan
		Jumlah Tempat Hiburan Liar yang di tertibkan
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu
		Jumlah parpol yang menyampaikan laporan SPJ Keuangan Bantuan parpol tepat waktu.
		Jumlah Ormas di Kota Batam
		Jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa
		Jumlah kesiap-siagaan masyarakat terhadap peristiwa bencana
		Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa
		Jumlah kasus narkoba yang tertangani

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD
1	2	3
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemko Batam Tingkat Akuntabilitas Kinerja Predikat Penyelenggaraan Otonomi daerah Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Inspektorat
2	Membangun sistem reformasi birokrasi	Jumlah penurunan unit kerja yang melakukan penyimpangan keuangan
3	Mendorong implementasi 'pelayanan prima' Kota Batam	Persentase pejabat wajib LHKFN yang melaporkan LHKFN Tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat pada SKPD diLingkungan Pemerintah Kota Batam Jumlah Standar Operating Prosedur (SOP) Presentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan Tersusunnya formasi kebutuhan pegawai Presentase pemenuhan kebutuhan pegawai pemko batam Presentase kenaikan pangkat yang tepat waktu Presentase data pegawai yang telah masuk database kepegawaian Presentase menurunnya tingkat indisipliner aparatur Presentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal sesuai bidang tugasnya Jumlah pegawai mengikuti diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
4	Tersusunnya tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur	Jumlah Perda yang disusun Kota Batam Tersedianya profil daerah Buku Batam Dalam Angka Tersusunnya IPM Kota Batam Tersusunnya dokumen tinjauan sosial ekonomi

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN